

Dinamika Laut Cina Selatan dalam Perspektif Realisme Dunia Internasional

Andrian Rizky Moranta¹, Abdul Rivai Ras²

^{1,2} Program Studi Kajian Ketahanan Nasional, Universitas Indonesia
e-mail: andrian.rizky01@ui.ac.id¹, rivai_ras@yahoo.com²

Abstrak

Dinamika di Laut Cina Selatan sebagai salah satu wilayah laut terpenting dunia semakin berkembang seiring dengan semakin intensnya aktivitas Tiongkok yang melakukan klaim akan wilayah tersebut dengan sembilan garis putus-putusnya. Hal tersebut mendorong Amerika Serikat untuk turut terlibat di kawasan untuk melawan pengaruh Tiongkok di kawasan. Sebagai organisasi internasional yang menaungi negara-negara di dunia, penting untuk melihat lebih lanjut peran PBB dalam dinamika di Laut Cina Selatan. Dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut dinamika di kawasan Laut Cina Selatan mulai dari *balancing*, *security dilemma* hingga peran PBB dilihat dari perspektif realisme khususnya neo-realisme ofensif dan defensif. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa PBB terutama Dewan Keamanan PBB cenderung tidak berdaya dalam menghadapi dinamika yang melibatkan anggota Dewan Keamanan PBB.

Kata kunci: Realisme, Tiongkok, Amerika Serikat, PBB, Laut Cina Selatan

Abstract

The condition in the South China Sea as one of the world's most important sea areas are developing along with China's increasingly intense activities by claiming the area with its nine-dash line. This prompted the United States to get involved in the region to counter China's influence in the region. As an international organization that oversees countries all over the world, it's important to see the role of the United Nations in the dynamics of the South China Sea. In this paper, we discussed further the development in the region, such as balancing, security dilemmas and the role of the United Nations from the perspective of realism, especially offensive and defensive neo-realism. This study used descriptive qualitative methods and the results showed that the UN, especially the UN Security Council tend to be powerless in dealing with cases involving members of the UN Security Council.

Keywords: *Realism, China, US, UN, South China Sea*

PENDAHULUAN

Laut Cina Selatan merupakan salah satu wilayah laut terpenting di dunia karena menjadi jalur perdagangan laut sekaligus memiliki sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan data AMTI CSIS diperkirakan sekitar 190 Triliyun kubik gas alam dan 11 Miliar barel minyak yang terbukti dan cadangannya terkandung di Laut Cina Selatan. Dinamika di kawasan ini semakin berkembang ketika Tiongkok melalui sembilan garis putus-putusnya melakukan klaim akan Laut Cina Selatan berdasarkan klaim historis mereka. Negara-negara lain seperti Filipina, Vietnam, Malaysia hingga Indonesia yang wilayah lautnya termasuk maupun berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan pun menentang klaim Tiongkok tersebut. Meskipun begitu, aktivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan seperti pembangunan pangkalan militer di pulau buatan hingga patroli kapal perang angkatan laut dan *coast guard* mereka tetap berlangsung hingga saat ini dan menciptakan ketegangan dengan negara-negara tetangga di kawasan Laut Cina Selatan.

Aktivitas Tiongkok di kawasan pada akhirnya membuat khawatir Amerika Serikat sebagai kekuatan tunggal unipolar di dunia. Amerika Serikat hingga saat ini dan diawali

dengan visi *Pivot to Asia* pada masa pemerintahan Presiden Barrack Obama telah mengalihkan perhatiannya ke wilayah Asia-Pasifik untuk menghadapi aktivitas sekaligus kebangkitan Tiongkok di kawasan. Hal tersebut merupakan *balancing* dari Amerika Serikat terhadap pengaruh Tiongkok di kawasan. Selain *balancing* yang terjadi, aktivitas Tiongkok dapat turut memicu terjadinya *security dilemma* di kawasan akibat ketegangan yang terjadi dengan negara-negara lain. Melihat hal ini, tentu respon organisasi internasional seperti PBB sebagai lembaga internasional tertinggi di dunia ditunggu oleh semua pihak untuk hadir dan aktif berkontribusi sebagai penengah akan ketegangan yang terjadi. Namun hingga saat ini PBB cenderung tidak berdaya menghadapi isu-isu yang ada di kawasan Laut Cina Selatan khususnya yang menyangkut Tiongkok maupun Amerika Serikat yang merupakan dua kekuatan utama ekonomi dan militer di dunia saat ini sekaligus anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Beberapa kondisi yang dijelaskan sebelumnya dapat ditelaah lebih lanjut melalui prinsip realisme dalam dunia internasional. Realisme dalam dunia internasional menekankan pada tidak adanya entitas yang lebih kuat dari aktor negara bahkan jika dibandingkan dengan organisasi internasional yang membawahi negara itu sendiri. Dalam tulisan ini akan dibahas lebih lanjut tentang realisme dunia internasional yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan dilihat dari respon organisasi internasional tertinggi seperti PBB dan juga negara-negara rival Tiongkok seperti Amerika Serikat dan sekutunya terhadap aktivitas Tiongkok di Laut Cina Selatan serta bagaimana *security dilemma* yang tercipta. Kemudian juga akan dijelaskan langkah-langkah yang mungkin dilakukan oleh PBB khususnya dalam menghadapi konflik yang sedang terjadi di Laut Cina Selatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan dipaparkan dalam bentuk deskriptif. Mason (2002) menjelaskan bahwa metode kualitatif mengaitkan hubungan antara variabel, fenomena dan lain-lainnya tanpa menggunakan pengukuran numerik dan menggunakan data-data yang bersifat kualitatif. Mason menambahkan bahwa melalui penelitian kualitatif, dimensi dunia sosial dalam lingkup yang luas dapat turut dijelajahi. Sumber data dalam penelitian ini berasal dari buku-buku terkait realisme dunia internasional, data *Military Expenditure* dari *database* SIPRI serta penelitian terdahulu tentang PBB dan hubungan internasional. Analisis data dilakukan dengan cara mengaitkan berbagai permasalahan yang telah dijelaskan sebelumnya dengan teori-teori realisme dunia internasional yang ada.

Terdapat dua teori utama yang dapat digunakan yaitu neorealisme defensif dan ofensif, salah satu neo-realis defensif seperti Waltz (1979) berpendapat bahwa sistem internasional lah yang menyebabkan negara-negara untuk bersikap lebih defensif dan moderat. Neorealisme defensif pada umumnya juga berpendapat bahwa negara-negara ingin menjaga keseimbangan kekuatan di dunia. Waltz juga berasumsi bahwa penyeimbangan (*balancing*) lebih umum dilakukan oleh negara-negara dibanding *bandwagon*. Kemudian, kelanjutan dari teori Waltz dipaparkan oleh neorealis ofensif seperti J.J. Mearsheimer (2014) yang menjelaskan tentang penyebab negara-negara saling takut satu sama lain, yaitu yang pertama akibat tidak adanya kekuatan yang lebih tinggi dari negara-negara yang dapat melindungi suatu negara dari ancaman negara lainnya. Penyebab kedua adalah akibat sebuah negara akan selalu memiliki kemampuan ofensif dan penyebab ketiga adalah suatu negara tidak akan bisa yakin akan tujuan negara lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tiongkok terus berupaya memperkuat klaimnya akan Laut Cina Selatan dengan membangun pulau buatan serta pangkalan militer di Kepulauan Spratly. Pembangunan pangkalan militer tersebut semakin besar setiap tahunnya dan masih terus berlangsung hingga saat ini. Filipina sebagai salah satu negara terdampak di Laut Cina Selatan pernah membawa kasus klaim sembilan garis putus-putus Tiongkok yang turut mengambil wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik Filipina ke Pengadilan Arbitrase Internasional. Hasilnya,

Pengadilan Arbitrase Internasional memenangkan Filipina dan menolak klaim sembilan garis putus-putus yang dilakukan Tiongkok atas wilayah ZEE Filipina.

Namun Tiongkok secara terang-terangan menolak keputusan arbitrase tersebut yang menjadikan tensi semakin tinggi di kawasan. Berdasarkan Pasal 279 Section 1 United Nations Convention on the Law of the Seas, PBB sendiri selalu berkomitmen untuk mendorong penyelesaian konflik internasional dengan damai dan menunjukkan dirinya sebagai insitusi terdepan dalam menghadapi masalah tersebut. Dalam hal konflik maritim, PBB juga telah menciptakan beberapa organisasi dan konvensi seperti UNCLOS yang mendorong terciptanya arbitrase dan mediasi dalam konflik tersebut. Dalam kasus Laut Cina Selatan yang terkandung dalam UNCLOS, PBB dapat berperan sebagai mediator antara Filipina dan Tiongkok. Masalah pertama muncul ketika UNCLOS tidak memiliki metode penegakkan hukum terkait dengan hasil arbitrase tersebut, UNCLOS tidak memiliki senjata yang mumpuni dalam mengatasi konflik teritorial yang memiliki pertarungan besar akan kekuatan negara tersebut.

Masalah selanjutnya hadir dalam diri PBB sendiri dalam proses penerbitan resolusi. Resolusi yang dikeluarkan terkait dengan permasalahan teritorial oleh PBB harus melalui persetujuan Majelis Umum dan Dewan Keamanan PBB. Dalam kasus Laut Cina Selatan, sayangnya resolusi yang ingin dikeluarkan tidak mendapatkan persetujuan Dewan Keamanan PBB akibat hak veto yang dimiliki Tiongkok sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Hal ini menunjukkan ketidakmampuan PBB dalam menghadapi kasus-kasus yang diliputi oleh kepentingan negara secara politis khususnya jika melibatkan negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB itu sendiri.

Anggota Dewan Keamanan PBB pada dasarnya dapat berkompromi untuk menggunakan kekuasaannya demi kepentingan nasionalnya masing-masing. Bagaimanapun respon yang diberikan PBB akan tergantung pada kerja sama dan kesepakatan pihak-pihak yang bertikai, dalam hal ini yaitu kooperasi Tiongkok. Jika Tiongkok tidak ingin berkerja sama dan menuruti PBB dalam penyelesaian masalah, tidak banyak yang dapat dilakukan PBB. Karena pada dasarnya organisasi internasional yang dianggap sebagai entitas tertinggi melebihi negara dibangun dan terdiri dari negara itu sendiri, maka tidak mungkin PBB misalnya sebagai organisasi internasional mampu bergerak sendiri mengontrol apa yang membentuk badan mereka. Hal tersebut menjadi sebuah bukti, kuatnya posisi negara dan anarkisnya dunia internasional seperti yang para realis kemukakan.

Berdasarkan paradigma realisme yang mengambil sikap bahwa akibat dunia internasional yang anarkis maka negara-negara di dunia akan mengutamakan dirinya sendiri terlebih dahulu, dalam hal ini termasuk Amerika Serikat yang tentu akan mengutamakan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu. Drew dan Snow (1988) menjelaskan tentang empat tingkatan kepentingan nasional Amerika Serikat. Tingkat tertinggi adalah kepentingan survival atau kebutuhan untuk mempertahankan keberlangsungan negara khususnya melalui pertahanan. Tingkat selanjutnya adalah kepentingan vital yang di dalamnya termasuk sektor ekonomi dan segala hal yang vital bagi Amerika Serikat. Tingkat ketiga adalah kepentingan utama yang mencakup peran Amerika Serikat dalam menjaga tatanan dunia yang baik. Dan tingkatan terakhir adalah kepentingan tambahan yang mencakup penghargaan Amerika Serikat terhadap nilai-nilai seperti Hak Asasi Manusia dan lain-lain.

Terdapat pada tingkat mana kepentingan Amerika Serikat di kawasan Laut Cina Selatan dapat dilihat dari seberapa penting peran Laut Cina Selatan bagi Amerika Serikat. Posisi Laut Cina Selatan secara geografis selain merupakan jalur perdagangan internasional dan juga cukup dekat dengan wilayah Amerika Serikat seperti Guam serta sekutu-sekutunya di kawasan seperti Jepang dan Korea Selatan yang turut terdampak oleh aktivitas Tiongkok di kawasan. Hal tersebut menjadikan alasan pertahanan dan keamanan yang termasuk kepentingan survival pun valid digunakan. Alasan ekonomi atau tingkat vital juga dapat digunakan mengingat jika jalur perdagangan global di Laut Cina Selatan dikuasai Tiongkok maka Amerika Serikat juga akan mengalami kerugian secara ekonomi, maka alasan kepentingan vital yang mencakup ekonomi pun dapat digunakan.

Langkah selanjutnya yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi strategi apa yang digunakan oleh Amerika Serikat dalam mewujudkan kepentingan nasionalnya tersebut. Kai He (2010) menjelaskan bahwa terdapat tiga kemungkinan *grand strategy* Amerika Serikat yang dapat diterapkan terhadap Tiongkok. Ketiga *grand strategy* tersebut bergantung pada bagaimana Amerika Serikat melihat dirinya terhadap Tiongkok. Strategi pertama adalah jika Amerika Serikat melihat dirinya sebagai kekuatan yang sedang bangkit, maka strategi *selective engagement* merupakan strategi yang digunakan. Kemudian, jika Amerika Serikat melihat dirinya sebagai kekuatan yang stabil dan berkuasa maka strategi yang digunakan adalah *hegemonic dominion*. Dan yang terakhir, jika Amerika Serikat melihat dirinya sebagai kekuatan yang menurun maka strategi *off-shore balancing* atau multilateralisme merupakan kebijakan yang dipilih.

Mearsheimer (2016) menjelaskan bahwa dengan *Off-shore balancing* Amerika Serikat membagi beban dalam menjaga keseimbangan kekuatan (*Balance of Power*) kepada pasukan regional dalam hal ini yaitu sekutunya di kawasan di wilayah mereka sendiri. Praktik strategi *off-shore balancing* Amerika Serikat sendiri hadir dalam visi *Free and Open Indo Pacific* (FOIP) yang dicanangkan oleh Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya seperti Jepang, Australia dan India yang tergabung dalam *Quadrilateral Security Dialogue* (QUAD). FOIP sendiri mencakup berbagai sektor termasuk ekonomi, energi, lingkungan dan tentu saja militer dan setiap negara QUAD memiliki interpretasi sendiri tentang kawasan Indo-Pasifik yang bebas dan terbuka seperti yang dicanangkan oleh FOIP. Implementasi FOIP Amerika Serikat misalnya dalam bidang ekonomi dapat dilihat dari Amerika Serikat yang selama tiga tahun pertama pemerintahan Presiden Trump telah menyediakan lebih dari 4,5 miliar dollar AS dalam bentuk bantuan luar negeri kepada negara-negara di wilayah Indo-Pasifik. Kongres Amerika Serikat juga mendukung FOIP dengan mengeluarkan Undang-Undang *Better Utilization of Investments Leading to Development* (BUILD) pada Oktober 2018 dan *Asia Reassurance Initiative* pada November 2018.

Secara militer, FOIP membuat negara-negara anggota QUAD dan sekutu-sekutu Amerika Serikat dari seluruh dunia semakin rutin melakukan latihan militer bersama di kawasan Indo-Pasifik khususnya Laut Cina Selatan untuk menjamin adanya kebebasan navigasi yang menjadi salah satu tujuan FOIP. FOIP khususnya secara militer merupakan bentuk penyeimbangan seperti yang disampaikan oleh Waltz sebelumnya yang dilakukan oleh Amerika Serikat dan sekutunya terhadap pengaruh Tiongkok di kawasan. Tercatat negara-negara anggota NATO seperti Perancis dan Inggris telah mengirimkan kapal perang mereka ke kawasan Indo-Pasifik, sedangkan negara lain seperti Jerman juga telah berencana untuk mengirim kapal perang ke Laut Cina Selatan. Kawasan Indo-Pasifik khususnya Laut Cina Selatan kini tidak lagi penuh oleh pertikaian antara kapal perang Tiongkok dan negara-negara di kawasan, namun juga Amerika Serikat dan sekutunya.

Bagaimana dinamika kondisi Laut Cina Selatan dapat dilihat juga dari terciptanya *security dilemma* yang berujung pada *arms race* di antara negara-negara di kawasan termasuk Indonesia di dalamnya. *Security dilemma* dapat diartikan sebagai kondisi di mana suatu negara ingin meningkatkan keamanannya dengan meningkatkan kekuatan yang berujung pada negara lain yang merasa terancam dan turut meningkatkan kekuatannya dan pada akhirnya berujung pada menurunnya tingkat keamanan negara pertama. Dalam kasus kawasan Laut Cina Selatan hal ini dapat dilihat dari peningkatan anggaran maupun belanja pertahanan negara-negara di kawasan. Tiongkok yang berusaha meningkatkan keamanannya dengan peningkatan anggaran dan belanja besar-besaran berujung pada peningkatan anggaran dan belanja negara-negara lain di kawasan.

Tabel 1. Data Belanja Pertahanan Beberapa Negara di Kawasan (2015-2021) (Dalam Juta Dollar (Konstan 2020))

Negara	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Tiongkok	197680, 5	209060, 1	221917, 6	234916, 7	246361, 2	257973, 4	270016, 6
Jepang	48596,2	48302,3	47990,9	50411,3	52041,9	51970,8	55773,5
Australia	23750,7	26008,1	25961,6	25341,7	26028,7	27300,9	28398,2
India	57590,0	63467,8	67938,7	70901,5	75248,7	72937,1	73574,7
Korea Selatan	36965,3	37891,6	38588,5	40545,6	43601,9	45524,0	47676,3
Taiwan	11087,0	10896,4	11041,2	10802,9	11521,7	11923,7	12090,1
Indonesia	8122,5	7580,2	8738,6	7682,9	8063,0	9387,0	7965,1

Berdasarkan data Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI) sejak tahun 2015 saja belanja pertahanan Tiongkok mengalami peningkatan dari angka 197,680 Milyar Dollar AS menjadi 234,916 Milyar Dollar AS pada 2018 hingga mencapai 270,016 Milyar Dollar AS pada tahun 2021. Hal tersebut diikuti oleh negara-negara QUAD di kawasan, sebagai contoh Jepang yang pada 2015 berada pada angka 48,596 Milyar Dollar AS menjadi 50,041 Milyar Dollar AS pada 2018 hingga mencapai 55,773 Milyar Dollar AS pada tahun 2021. India juga merupakan salah satu negara dengan peningkatan belanja yang sangat pesat dari angka 57,590 Milyar Dollar AS menjadi 70,901 Milyar Dollar AS pada tahun 2018 dan menembus angka 73,574 Milyar Dollar AS pada tahun 2021.

Indonesia sendiri mengalami fluktuasi belanja sebelum tahun 2018 hingga akhirnya terus meningkat dari angka 7,68 Milyar Dollar AS pada 2018 menjadi 9,38 Milyar Dollar AS sebelum kembali turun ke angka 7,965 Milyar Dollar AS pada 2021 akibat Pandemi COVID-19 yang melanda dunia. Secara total di kawasan Asia dan Oceania terdapat peningkatan belanja pertahanan yang cukup signifikan dari angka 433,8 Milyar Dollar AS pada 2015 menjadi 494,9 Dollar AS pada 2018 dan mencapai angka 553,1 Milyar Dollar AS pada tahun 2021. Perlu diingat bahwa pada tahun 2020 terdapat pandemi yang mengguncang ekonomi di seluruh dunia namun belanja pertahanan berbagai negara dan secara keseluruhan di kawasan tetap mengalami peningkatan yang signifikan.

Tabel 2. Total Belanja Pertahanan seluruh Negara di Kawasan Asia-Oceania (2015-2021) (Dalam Milyar Dollar (Konstan 2020))

Wilayah	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Asia & Oceania	433,8	456,2	476,8	494,9	519,4	534,2	553,1

Security Dilemma yang muncul dapat dikaitkan dengan pernyataan Mearsheimer (2014) menjelaskan tentang penyebab negara-negara saling takut satu sama lain, yaitu yang pertama akibat tidak adanya kekuatan yang lebih tinggi dari negara-negara yang dapat melindungi suatu negara dari ancaman negara lainnya. Peningkatan belanja militer menunjukkan setiap negara tidak bergantung pada entitas lain selain negara itu sendiri dan berusaha meningkatkan kekuatannya sendiri. Kedua adalah akibat sebuah negara akan selalu memiliki kemampuan ofensif dan ketiga suatu negara tidak akan bisa yakin akan tujuan negara lainnya. Ditunjukkan dari kekhawatiran akan kapabilitas dan aktivitas Tiongkok di kawasan yang muncul di antara negara-negara di kawasan dan berujung pada peningkatan belanja militer. Selain itu, setiap negara juga tidak bisa yakin akan tujuan Tiongkok sehingga harus bersiap untuk segala kemungkinan dengan peningkatan belanja militer.

Selain berdasarkan veto anggotanya seperti yang dijelaskan sebelumnya, terdapat sudut pandang lain dalam melihat kinerja PBB khususnya Dewan Keamanan PBB. Frederking & Patane (2017) dalam penelitiannya, pertama menjelaskan tentang dua prediktor yang memicu agenda PBB, dijelaskan bahwa pengungsi dan kematian merupakan prediktor dan pengungsi merupakan prediktor yang lebih baik yang dijelaskan para kaum rasionalis bahwa dengan adanya pengungsi akan mempengaruhi kepentingan negara anggota lain di luar negara yang berkonflik. Kedua, konflik harus relatif intens untuk Dewan Keamanan PBB dapat bertindak terutama untuk pengesahan resolusi. Setidaknya perlu ada beberapa ribu pengungsi atau kematian untuk mendapat tanggapan dari Dewan Keamanan PBB. Penelitian ini pada akhirnya menjelaskan bahwa Dewan Keamanan PBB lebih dipengaruhi oleh intensitas konflik dibanding dengan hubungan strategis anggota veto dengan negara-negara yang terlibat dalam konflik. Penelitian ini tidak mendukung pendapat Dewan Keamanan PBB yang lebih skeptis dan realis.

Jika dikaitkan dengan kondisi konflik terkini, dalam perang Rusia-Ukraina misalnya. Kedua prediktor tersebut sudah terpenuhi dan konflik yang terjadi pun sudah cukup intens dan berlangsung hingga 3 bulan terakhir. Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan resolusi 2623 (2022) yang justru menjelaskan bahwa kurangnya kebulatan suara dari anggota tetap (Dewan Keamanan PBB) mencegah PBB dari melaksanakan tanggung jawab utamanya untuk pemeliharaan perdamaian dan keamanan internasional. Hal ini hanya berujung pada digelarnya pertemuan darurat Majelis Umum PBB dengan hasil PBB menuntut penarikan pasukan oleh Rusia dari Ukraina. Namun hingga kini perang tetap berlanjut, PBB hanya dapat mengecam atau mengunjungi Kiev sebagai bentuk solidaritas namun tidak bisa melakukan apapun untuk menghentikan konflik.

Konflik Rusia-Ukraina menjadi konflik terkini yang dapat menjadi contoh bagaimana kondisi jika Anggota Dewan Keamanan PBB terlibat secara langsung dalam konflik yang menjadi perhatian dunia. Dengan semakin penuhnya Laut Cina Selatan dengan kapal perang dan meningkatnya belanja pertahanan negara-negara di kawasan, maka potensi akan gesekan maupun konflik pun menjadi semakin tinggi baik akibat *balancing* maupun *security dilemma* yang hadir di kawasan. Hal tersebut juga merupakan bukti lain yang menunjukkan lemahnya PBB sebagai organisasi internasional tertinggi dibanding dengan aktor negara khususnya negara-negara adidaya dan kekuatan veto yang ada.

Dan sedikit berbeda dengan konflik Rusia-Ukraina yang secara langsung hanya melibatkan dua negara, negara-negara yang terlibat dan melibatkan diri di Laut Cina Selatan secara langsung merupakan negara-negara besar dengan kemampuan militer mumpuni dan memiliki kemampuan untuk menciptakan konflik berskala global apabila dibutuhkan. Apa yang terjadi di kawasan Laut Cina Selatan dapat menjadi katalis kondisi dunia ke depannya jika PBB tetap tidak memiliki kekuatan ataupun pengaruh yang diperlukan dalam menjaga keamanan dunia internasional. Hal tersebut di sisi lain kembali membuktikan pendapat Mearsheimer tentang tidak ada kekuatan yang lebih tinggi dari aktor negara.

Dalam menghadapi kondisi yang kurang menguntungkan tersebut, lantas langkah apakah yang sebaiknya dilakukan PBB? Terdapat beberapa opsi yang dapat dilakukan meskipun pada praktiknya mungkin akan sulit dilakukan. Yang pertama adalah PBB dapat mengubah struktur Dewan Keamanan PBB maupun metode veto yang dapat digunakan untuk menghalangi resolusi PBB. Langkah ini merupakan langkah yang tersulit untuk dapat diwujudkan karena selain harus meratifikasi Piagam PBB, diperlukan kerjasama anggota tetap Dewan Keamanan PBB untuk mengubah sistem veto yang ada, jika pada dasarnya anggota tetap Dewan Keamanan PBB mengutamakan kepentingan nasionalnya terlebih dahulu, maka sampai kapan pun sistem veto akan terus digunakan karena dapat berguna bagi kepentingan nasional negara-negara anggota itu sendiri.

Oludoun (2014) menjelaskan bawa Piagam PBB dalam Pasal 108 menjelaskan tentang amandemen piagam PBB akan berlaku bagi semua Anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa apabila telah diterima dengan suara dua pertiga dari anggota Majelis Umum dan diratifikasi sesuai dengan proses konstitusional masing-masing oleh dua pertiga anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa, termasuk semua anggota tetap Dewan Keamanan.” Ini berarti

bahwa hak veto berlaku di sini dan dapat digunakan oleh anggota Dewan Keamanan PBB mana pun untuk mengesampingkan langkah reformasi atau amandemen piagam PBB.

Langkah selanjutnya yang mungkin dapat dilakukan adalah mengangkat agenda Laut Cina Selatan ke dalam forum Dewan Keamanan PBB sebelum situasi semakin memanas dan bukan sebaliknya. Seperti dijelaskan sebelumnya bahwa agenda Dewan Keamanan PBB cenderung mengangkat satu konflik menjadi agenda saat konflik telah menjadi intens dan menyebabkan pengungsi dan korban jiwa. Jika berdasarkan pendapat para rasionalis bahwa veto anggota Dewan Keamanan PBB tidak lebih penting dalam menghasilkan resolusi. Dewan Keamanan PBB harus mengubah cara pandangnya dalam melihat konflik dan mengedepankan pencegahan sebelum konflik berkembang menjadi lebih intens. Hal ini juga untuk mencegah potensi veto yang muncul saat perang sudah kepalang tanggung atau negara anggota Dewan Keamanan PBB tidak memiliki pilihan lain selain menolak resolusi yang ada.

Langkah terakhir yang paling mudah dan mungkin dilakukan oleh PBB adalah justru tidak melakukan apa-apa. PBB sendiri sudah menyediakan UNCLOS sebagai sarana bagi negara-negara untuk menentukan batas teritorinya masing-masing. Selain itu, dengan sistem veto yang ada, akan sulit atau bahkan tidak mungkin bagi PBB untuk menghasilkan resolusi yang memiliki kekuatan dan mengikat seluruh pihak khususnya anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang turut berkonflik di Laut Cina Selatan. Pada akhirnya dalam dunia internasional yang anarkis ini dan dengan negara sebagai kekuatan tertinggi di dunia, maka biarlah negara-negara yang akan menyelesaikan masalah mereka sendiri.

SIMPULAN

Laut Cina Selatan merupakan salah satu kawasan terpenting di dunia dengan sumber daya alam dan posisi strategisnya. Tiongkok dengan sembilan garis putus-putusnya melakukan klaim akan wilayah tersebut berdasarkan klaim historis yang menyebabkan ketegangan dengan negara-negara lain di kawasan. Realisme khususnya neorealisme sendiri menekankan pada negara sebagai kekuatan tertinggi di dunia dan negara tidak pernah yakin akan tujuan negara lainnya. Dalam kasus di Laut Cina Selatan, hal ini dapat dilihat dari putusan arbitrase yang memenangkan Filipina akan konflik dan ditolak oleh Tiongkok, dalam kasus ini PBB tidak dapat berbuat banyak akibat status Tiongkok sebagai anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Pengaruh Tiongkok yang semakin menguat di Laut Cina Selatan pun membuat Amerika Serikat dan sekutunya melakukan penyeimbangan dengan mengeluarkan visi *Free and Open Indo-Pacific* (FOIP). Visi FOIP dalam bidang militer khususnya menyebabkan wilayah Laut Cina Selatan semakin penuh dengan kapal perang dari luar kawasan seperti Inggris dan Perancis yang turut datang. Selain itu, akibat peningkatan belanja militer besar-besaran oleh Tiongkok menyebabkan terciptanya *Security Dilemma* yang dapat dilihat dari turut meningkatnya belanja militer berbagai negara di kawasan. Dengan banyaknya anggota Dewan Keamanan PBB yang terlibat dalam konflik ini, semakin sulit bagi PBB untuk turut mengendalikan semua pihak. Namun terdapat beberapa langkah yang dapat diambil PBB seperti meratifikasi Piagam dan struktur Dewan Keamanan PBB, melibatkan konflik yang belum parah ke dalam agendanya atau justru tidak berbuat apa-apa, karena di dunia internasional yang dilihat dari kaca mata realis di mana aktor negara lebih berkuasa, maka biarlah negara-negara yang menyelesaikan masalahnya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- AMTI. *South China Sea Energy Exploration and Development*. Diakses pada 22 Juni 2021 pukul 17.16 WIB melalui <https://amti.csis.org/south-china-sea-energy-exploration-and-development/>
- Birdwell, I & Taherian, S. 2020. *Expansionism, Projecting Power, and Territorial Disputes: The South China Sea*. Old Dominion University.
- Clancy, P. 2021. Permanent Neutrality and the UN Security Council. *Irish Studies in International Affairs*. Vol.32 No.1 Hlm. 241-259.

- Drew, Dennis M dan Snow, Donald M. 1988. *Making Strategy An Introduction to National Security Processes and Problems*. Alabama: Air University Press.
- Frederking, B & Patane, C. 2017. "Legitimacy and the UN Security Council Agenda". *American Science Political Association*. April 2017. Hlm. 347-353
- He, K. 2010. "The Hegemon's choice between power and security: Explaining US policy toward Asia after the Cold War". *Review of International Studies*, 36(4), Hlm. 1121.1143.
- Mason, J. 2002. *Qualitative Research, 2nd Edition*. London: SAGE Publications.
- Mearsheimer, J J. & Walt, S.M. 2016. The Case for Offshore Balancing: A Superior U.S. Grand Strategy. *Foreign Affairs*. July 2016. Hlm. 70-83.
- Mearsheimer, J J. 2014. *The Tragedy of Great Power Politics*. New York: Norton.
- Oludoun, T. 2014. Peace and Security as a Catalyst for the Reform of the UN Security Council. *Uluslararası Hukuk ve Politika*, Vol. 10, Edisi 39 Hlm. 63-96
- SIPRI. 2021. *Military expenditure by country, in constant (2020) US\$ m., 2010-2021*. Stockholm: SIPRI.
- SIPRI. 2021. *Military expenditure by region in constant US dollars. 2010-2021*. Stockholm: SIPRI.
- UN News. 2022. *General Assembly resolution demands end to Russian offensive in Ukraine*. Diakses pada 10 Mei 2022 pukul 10.53 WIB melalui <https://news.un.org/en/story/2022/03/1113152>
- United Nation Security Council. Resolution 26233 (2022).
- United Nations. "United Nations Convention on the Law of the Seas." United Nations, December 10, 1982. Part XV, Section 1, Article 279.
- United States of America Department of State. (2019). *A Free and Open Indo-Pacific Advancing a Shared Vision*. Washington D.C: United States of America Department of State.
- Waltz, Kenneth. (1979). *Theory of International Politics*. New York: McGraw Hill.